

# Jawa Barat: Antara Stigma Intoleran dan Kesadaran Berpancasila

Wildan Hakim S.Sos., M.Si.

Dian Permata S.Sos., MPA

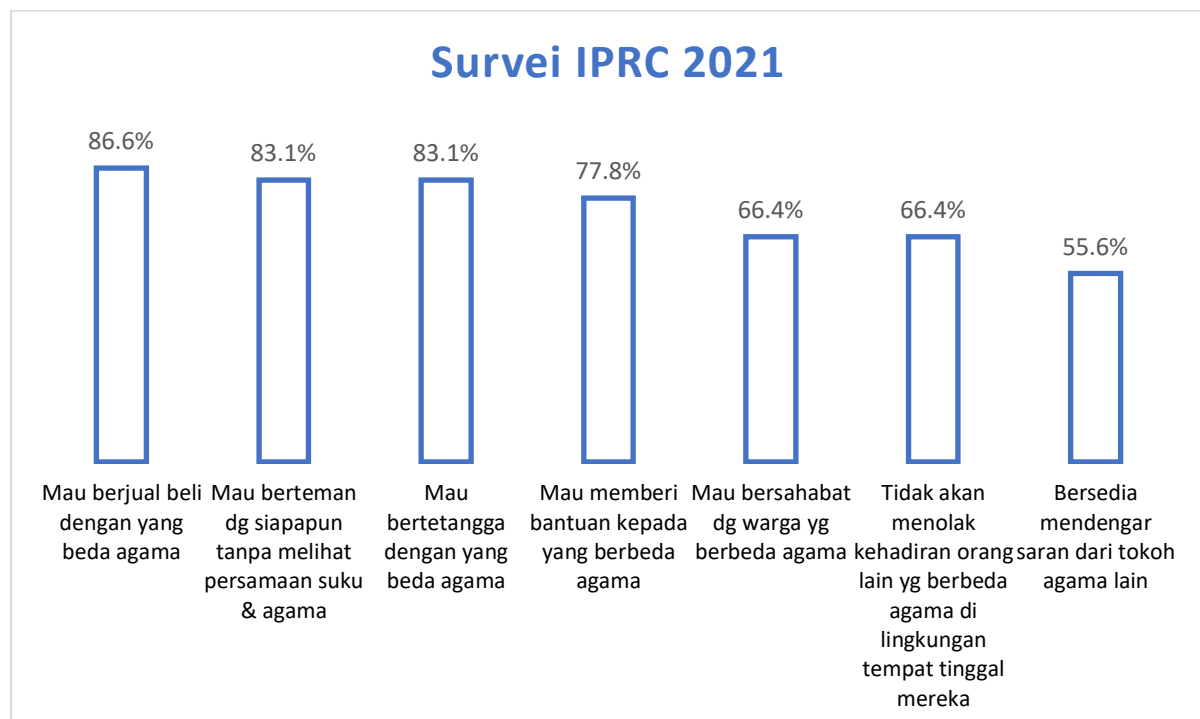
## Pengantar

Pada November 2019 lalu, SETARA Insitute menyebut Jawa Barat sebagai provinsi paling intoleran. Stigma provinsi paling intoleran ini disebabkan oleh tiga faktor. Pertama, adanya tingginya politik identitas di wilayah Jawa Barat. Kedua, keberadaan aktor kunci yang menyebabkan adanya pelanggaran kebebasan beragama dan berkeyakinan. Ketiga, adanya partai nasionalis yang turut memproduksi peraturan daerah bernuansa syariah.

Fenomena intoleransi yang dikaji oleh SETARA Insitute merujuk pada hasil penelitian yang sudah dilakukan sejak 2007 silam. Selama lima tahun terakhir yakni pada kurun 2015-2019, tercatat ada 162 peristiwa pelanggaran kebebasan beragama. Angka ini terhitung paling tinggi dibandingkan provinsi lainnya di Indonesia.

Stigma yang melekat pada Jawa Barat sebagai provinsi paling intoleran terus berlanjut hingga 2021. Dalam catatan SETARA Insitute, pada 2021 terjadi 40 peristiwa pelanggaran kebebasan beragama dan berkeyakinan di Jawa Barat. Jumlah ini terbanyak se-Indonesia. Protes terhadap temuan SETARA Insitute disampaikan Kepala Kesbangpol Jabar Iip Hidayat. Menurut Iip, sikap intoleran belum tentu terjadi di 27 kabupaten atau kota di Jawa Barat. Sebagaimana dikutip dari galamedia.pikiran-rakyat.com (19/02/2021), Iip Hidayat menyatakan Kesbangpol Jabar akan data maupun informasi yang ada di seluruh kabupaten dan kota, dalam menemukan formulasi dalam menentukan langkah selanjutnya.

Guna menjawab stigma intoleran terhadap Provinsi Jawa Barat, Indonesian Politics Research & Consulting (IPRC) menyelenggarakan survei yang kemudian dipublikasikan di media massa. Dikutip dari wartaekonomi.co.id (10/06/2021), survei IPRC menunjukkan bahwa masyarakat Jawa Barat sangat toleran dan bisa hidup berdampingan dengan siapapun. Data rinci tentang hasil survei IPRC tersaji pada grafik berikut ini.



Grafik 1. Survei IPRC pada 2021 tentang toleransi warga Jawa Barat

Merujuk pada grafik di atas, Direktur Operasional dan Data IPRC Idil Akbar menyatakan bahwa masyarakat Jawa Barat sangat toleran terhadap masyarakat lain yang berbeda suku dan agama. Survei IPRC juga menunjukkan hasil yang positif karena warga tidak mempersoalkan berbagai perbedaan yang ada.

Data survei memperlihatkan, 83,1persen responden mau berteman dengan siapapun tanpa melihat persamaan suku dan agama. Bahkan 66,4persen mau bersahabat dengan yang beda agama. Bahkan, 83,1persen responden mau bertetangga dengan yang beda agama dan 77,8persen yang mau memberi bantuan kepada yang berbeda agama. Survei tentang pola hubungan sosial masyarakat ini diselenggarakan di sembilan kabupaten dan kota di Jawa Barat di antaranya Ciamis, Cirebon, Depok, Garut, Karawang, Bekasi Bogor, Purwakarta, dan Tasikmalaya.

Sementara itu, Kepala Kesbangpol Jawa Barat Iip Hidajat mengatakan, tingkat toleransi warga Jawa Barat masih kuat. Namun Iip Hidajat mengakui adanya tindakan radikalisme di wilayah Jawa Barat. Bukti adanya radikalisme itu terlihat dari adanya penangkapan terhadap sejumlah terduga teroris yang tinggal di wilayah Jawa Barat.

Penolakan terhadap stigma intoleran terus berlanjut pada Februari 2022. Wakil Gubernur Jawa Barat Uu Ruzhanul kembali mempertanyakan stigma provinsi paling intoleran yang dilekatkan pada Provinsi Jabar. Sebagaimana dikutip dari tribunnews.com (10/02/2022), Uu Ruzhanul mempertanyakan kembali penilaian dari SETARA Institute. Menurutnya, hasil penelitian dari SETARA Institute tidak sesuai dengan survei yang dilakukan Badan Kesatuan Bangsa dan Politik Provinsi Jawa Barat. Survei Kesbangpol Jabar menyatakan kebebasan beragama dan berkeyakinan (KBB) di provinsi ini menempati peringkat terbaik ke-6 di Indonesia.

Selain membantah stigma provinsi paling intoleran, Uu Ruzhanul juga membantah stigma sejenis terhadap Kota Depok. Dikutip dari megapolitan.kompas.com (11/04/2022), Ruzhanul menyatakan bahwa penyebutan Kota Depok sebagai kota paling intoleran tidak tepat. Stigma intoleran yang dilekatkan pada Kota Depok berdampak terhadap Provinsi Jawa Barat karena Kota Depok merupakan salah satu kota yang berada di wilayah Jawa Barat.

Polemik seputar stigma provinsi paling intoleran yang disematkan kepada Jawa Barat ini selalu menarik perhatian publik. Selama ini, SETARA Institute menggunakan data yang diolah berdasarkan Indeks Kota Toleran (IKT). Indeks ini bertujuan menilai serta mengukur tingkat toleransi beberapa kota di Indonesia dengan menggunakan empat variabel yang tersaji pada tabel berikut ini.

Variabel	Deskripsi
<b>Regulasi Pemerintah Kota</b>	Rencana pembangunan dalam bentuk RPJMD dan produk hukum pendukung lainnya; dan kebijakan diskriminatif
<b>Tindakan Pemerintah</b>	Pernyataan pejabat kunci tentang peristiwa intoleransi; dan tindakan nyata terkait peristiwa
<b>Regulasi Sosial</b>	Peristiwa intoleransi; dan dinamika masyarakat sipil terkait peristiwa intoleransi
<b>Demografi Agama</b>	Heterogenitas keagamaan penduduk; dan inklusi sosial keagamaan

SETARA Institute menggunakan Indeks Kota Toleran untuk memberikan baseline dan status kinerja pemerintah kota dalam mengelola kerukunan, toleransi, wawasan kebangsaan dan inklusi sosial. Baseline ini akan menjadi pengetahuan bagi masyarakat dan dunia tentang kondisi toleransi di 94 kota di Indonesia.

Dalam Ringkasan Eksekutif Indeks Kota Toleran 2021, Kota Depok menjadi kota paling tidak toleran dengan skor paling rendah, yakni 3,577. Dalam penilaian ini, SETARA Institute mendefinisikan kota toleran sebagai berikut:

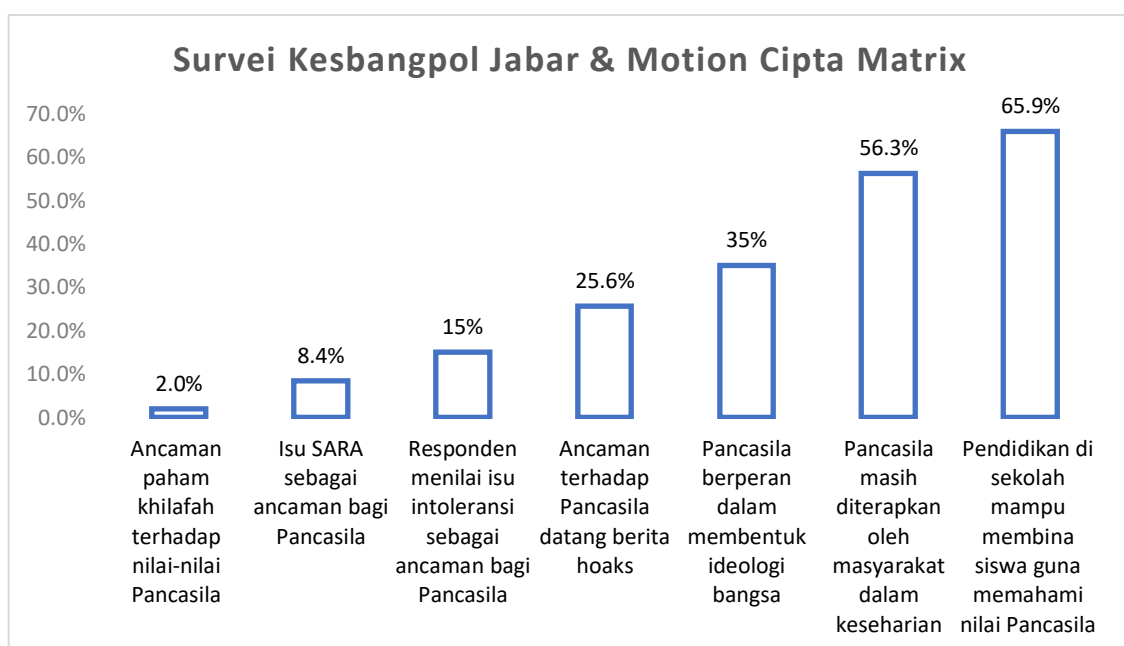
1. Visi dan rencana pembangunan yang inklusif serta mendukung keberagaman;
2. Regulasi yang kondusif bagi praktik dan promosi toleransi, baik dalam bentuk perencanaan maupun pelaksanaan;
3. Pernyataan dan tindakan aparaturnya pemerintah yang kondusif bagi praktik dan promosi toleransi;
4. Tingkat peristiwa dan tindakan pelanggaran kebebasan beragama/ berkeyakinan rendah atau tidak ada sama sekali; dan
5. Kota tersebut menunjukkan upaya yang cukup dalam tata kelola keberagaman identitas keagamaan warganya.

### Merespon Stigma Intoleran

Studi yang telah dipublikasikan oleh SETARA Institute merupakan masukan konstruktif bagi seluruh kepala daerah di Indonesia. Dengan adanya IKT, kepala daerah bisa mengevaluasi posisi visi pembangunan, regulasi, kebijakan yang disampaikan dalam bentuk pernyataan, peristiwa pelanggaran beragama dan berkeyakinan, serta upaya serius pemerintah kota atau pemerintah kabupaten dalam tata kelola keberagaman.

Kritik maupun penolakan atas hasil studi menjadi hal lazim dalam ranah akademik. Atas dasar itulah, kritik terhadap hasil studi SETARA Institute bisa dijawab atau direspon melalui survei kepada publik atau masyarakat Jawa Barat. Pada 24 Maret hingga 5 April 2022 Kesbangpol Jawa Barat menyelenggarakan survei yang menjangkau 440 orang responden yang sudah memiliki hak pilih atau yang sudah kawin atau menikah. Responden dicuplik dengan menggunakan metodologi multistage random sampling (acak berjenjang). Adapun tingkat kepercayaan sebesar 95 persen. Margin of error  $\pm 4,77$  persen.

Survei yang diselenggarakan Badan Kesatuan Bangsa dan Politik Provinsi Jawa Barat bersama Motion Cipta Matrix ini berfokus untuk menguji pengetahuan publik Jawa Barat seputar Pancasila. Hasil survei ini menjadi bahan menarik guna merespon stigma intoleran yang terlanjur pada Provinsi Jawa Barat. Grafik berikut ini menggambarkan ringkasan hasil survei yang dimaksud.



Mengacu pada grafik di atas, mayoritas masyarakat Jawa Barat menilai, ancaman terhadap Pancasila sebagai dasar negara dan ideologi bangsa dipicu oleh maraknya berita bohong atau hoaks. Persentase ancaman paham khilafah terhadap nilai-nilai Pancasila justru sangat rendah yakni hanya 2,05 persen. Hal itu terungkap dalam survei yang diselenggarakan. Dalam survei diketahui, 25,68 persen responden menyatakan bahwa ancaman terhadap Pancasila datang berita hoaks.

Kemudian, 15 persen responden menilai isu intoleransi sebagai ancaman bagi Pancasila. Diikuti dengan isu SARA sebesar 8,41 persen. Lebih lanjut survei ini juga mengungkapkan, 40 persen warga Jawa Barat memahami peran Pancasila sebagai dasar negara. Kemudian, 35 persen warga menilai peran Pancasila sebagai ideologi bangsa. Dari pertanyaan lanjutan yang diajukan, diketahui sebanyak 88,86 persen responden mengaku sangat setuju Negara Indonesia dibangun berdasarkan Pancasila.

Sebagai ideologi bangsa, Pancasila diharapkan bisa diterapkan dalam keseharian masyarakat Indonesia. 65,91 persen menilai pendidikan Pancasila di sekolah sudah mampu membina siswa guna memahami dan menerapkan nilai-nilai Pancasila dalam keseharian mereka. Angka ini juga diperkuat dengan sikap 56,36 persen responden yang menyatakan bahwa Pancasila masih diterapkan oleh masyarakat dalam kehidupan sehari-hari.

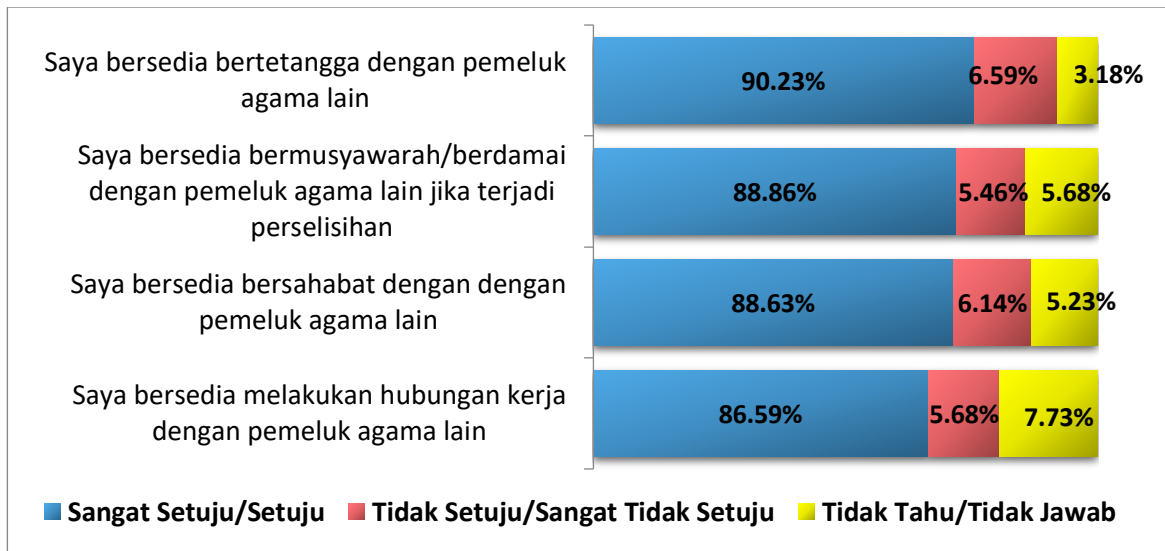
Dalam survei ini diketahui, pendidikan di sekolah masih menjadi sumber utama bagi warga Jawa Barat untuk mengetahui serta memahami esensi Pancasila. Tercatat, 86,14 persen responden mengetahui Pancasila dari sekolah. Berikutnya, 3,41 persen responden tahu tentang Pancasila dari media massa. Artinya, menurut Wildan saluran informasi masyarakat untuk meningkatkan pengetahuan mengenai Pancasila mesti ditambah. Selama ini masyarakat mendapat asupan informasi dan pengetahuan tentang

Sebanyak 87,50 persen responden mengetahui dengan baik jumlah sila dalam Pancasila. Sisanya mengaku tidak tahu. Angka ini terbilang menggembirakan, mengingat pemahaman dasar seputar Pancasila bisa diuji dari pertanyaan; berapa jumlah sila dalam Pancasila. 78,18 persen responden juga mengingat dengan baik jumlah lambang dalam Pancasila.

### **Kesadaran Berpancasila**

Hasil survei Badan Kesatuan Bangsa dan Politik Provinsi Jawa Barat bersama Motion Cipta Matrix menjadi modal bagus bagi seluruh kepala daerah di Jawa Barat. Stigma intoleran yang dipicu oleh politik identitas bisa direspon dengan hasil survei terbaru. Hanya ada 2 persenn warga Jabar yang menilai ide khilafah sebagai ancaman terhadap Pancasila. Angka ini bermakna bahwa ada ide lain yang justru berpotensi lebih besar mengancam Pancasila. 25,68 persen responden menyatakan bahwa ancaman terhadap Pancasila datang berita hoaks. Ke depan, hoaks tidak hanya mengancam Pancasila namun juga mengancam toleransi beragama. Ancaman lainnya terhadap Pancasila datang dari isu SARA dengan persentase sebesar 15 persen. Dengan temuan ini, seluruh kepala daerah di Jawa Barat perlu melakukan tindakan antisipatif agar isu SARA tidak terjadi dan kemudian menjadi bahan baku hoaks yang pada tahap berikutnya memantik amarah publik.

Temuan lain dari survei Badan Kesatuan Bangsa dan Politik Provinsi Jawa Barat bersama Motion Cipta Matrix juga menunjukkan bahwa toleransi warga Jawa Barat terhadap warga berbeda keyakinan masih bagus. Hal itu terlihat pada grafik berikut ini.



Terlihat pada grafik di atas, persentase warga Jawa Barat yang cenderung bersikap intoleran jauh lebih sedikit dibandingkan dengan warga yang bersikap toleran. Ini merupakan modal bagi Provinsi Jawa Barat untuk bisa lepas dari stigma intoleran di waktu mendatang.

## Daftar Pustaka

Media daring

<https://mediaindonesia.com/politik-dan-hukum/273507/jabar-provinsi-paling-intoleran-akibat-konservatisme-beragama>

<https://www.tribunnews.com/regional/2022/02/10/setara-institute-sebut-jawa-barat-daerah-intoleran-terbanyak-di-indonesia-begini-tanggapan-wagub-uu>

<https://galamedia.pikiran-rakyat.com/news/pr-351463584/jabar-bereaksi-usai-dicap-sebagai-provinsi-paling-intoleran-iip-kita-akan-tentukan-rencana-aksi>

<https://wartaekonomi.co.id/read345252/hah-beneran-jabar-provinsi-intoleran-cek-faktanya>

<https://megapolitan.kompas.com/read/2022/04/11/17335151/depok-disebut-kota-paling-intoleran-wagub-jabar-saya-selalu-muter-tak>

Ringkasan Eksekutif IKT 2021